

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan fundamental hampir di seluruh negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Setiap negara terus berupaya untuk menurunkan bahkan menghapuskan kemiskinan tersebut. Kondisi ini semakin relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia, Indonesia termasuk negara berkembang yang terus mengalami persoalan kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketika masyarakat memiliki rata-rata pengeluaran bulanan di bawah rata-rata penduduk sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi kemiskinan ini mulai muncul ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial dasar dalam rumah tangga mereka dan dianggap bahwa taraf hidup mereka masih di bawah level standar minimum (Amaliah et al., 2025). Hal ini menjadi penting karena besarnya tingkat kemiskinan dapat menggambarkan adanya ketimpangan dalam pendapatan maupun pembangunan di suatu wilayah.

Dalam Teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kondisi pasar yang jauh dari sempurna, modal terbatas, dan sumber daya manusia yang rendah sehingga menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah berdampak pada kecilnya pendapatan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat tabungan dan investasi. Kurangnya investasi ini memperparah kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus mampu memutus lingkaran dan perangkat kemiskinan tersebut (Shamim, 2022).

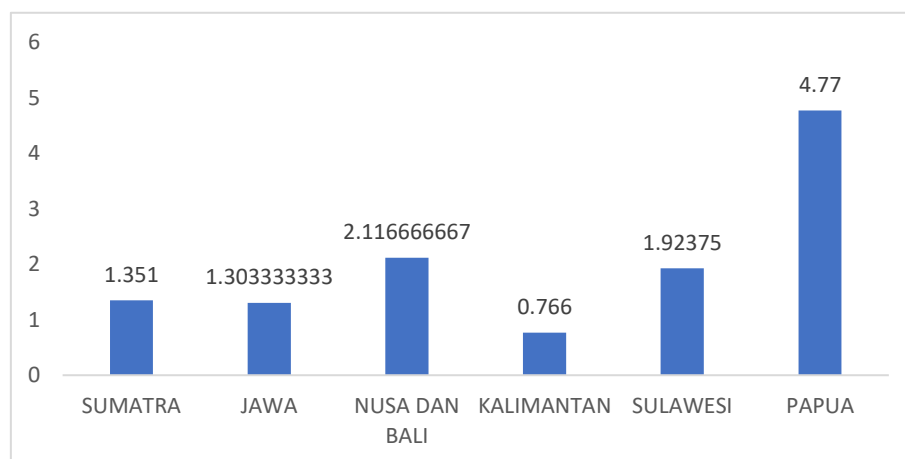
Dalam konteks ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi setelah Laos dalam hal proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan global. Laos mencatat persentase penduduk miskin sebesar 68,9% dari total populasi sekitar 7,8 juta jiwa. Sementara itu, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 171,8 juta penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan atau 60,3% dari total populasi 285,1 juta jiwa. Posisi Indonesia tersebut disusul oleh Filipina dengan 50,6%. Adapun negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dengan kisaran antara 1-19% berdasarkan standar pengukuran yang sama. Posisi Indonesia dalam peringkat tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan ukuran ekonomi dan kapasitas fiskal yang relatif lebih besar dibandingkan sebagian besar negara ASEAN lainnya. Tingginya proporsi penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan global mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Kondisi ini juga mencerminkan terbatasnya daya beli masyarakat serta tingginya tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga, yang menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dinikmati oleh seluruh lapisan penduduk (Santia, 2025).

Kemiskinan sendiri memiliki beberapa indikator pengukuran yang umum digunakan. Indikator pertama adalah tingkat kemiskinan (P0) yang menggambarkan persentase penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan, atau dengan kata lain menunjukkan seberapa besar proporsi masyarakat yang tergolong miskin. Indikator kedua yaitu kedalaman kemiskinan (P1), indikator

ini menunjukkan rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga semakin tinggi P1 maka semakin jauh kondisi penduduk miskin dari standar kebutuhan minimum yang seharusnya terpenuhi. P1 menjadi indikator yang lebih substansif karena tidak hanya menghitung jumlah masyarakat miskin, tetapi juga mengukur seberapa besar kesenjangan pengeluaran mereka dibandingkan garis kemiskinan. Sementara itu, indikator yang terakhir yaitu keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai ketimpangan diantara penduduk miskin itu sendiri, dengan memberi bobot lebih besar kepada mereka yang jauh dibawah garis kemiskinan.

Dalam penelitian ini, kedalaman kemiskinan (P1) dipilih karena mampu menggambarkan kondisi kemiskinan secara lebih nyata dibandingkan indikator lainnya. Berbeda dengan tingkat kemiskinan (P0) yang hanya menunjukkan persentase penduduk miskin, P1 menjelaskan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, P1 tidak hanya memperlihatkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga tingkat kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) memang memberikan gambaran tentang ketimpangan di antara penduduk miskin, tetapi indikator ini lebih sulit untuk diinterpretasikan secara langsung. Nilai P2 dipengaruhi oleh kondisi kelompok yang sangat miskin dan bersifat teknis, sehingga kurang mudah dipahami sebagai ukuran kondisi kemiskinan secara umum, terutama dalam analisis perbandingan antarwilayah. Oleh karena itu, P2 kurang tepat digunakan sebagai indikator utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut yang perlu diperhatikan adalah nilai kedalaman kemiskinan (P1) karena kedalaman kemiskinan mencerminkan seberapa sulit masyarakat miskin untuk keluar dari kondisi tersebut. Ketika nilai P1 tetap tinggi meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan ekonomi belum berimplikasi langsung pada perbaikan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah. Dengan demikian, kemiskinan dapat bertahan secara struktural meskipun jumlah penduduk miskin terlihat menurun, sehingga P1 menjadi indikator yang relevan dalam menilai kualitas upaya penanggulangan kemiskinan (Ananda et al., 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2025)

Gambar 1. 1 Kedalaman Kemiskinan Antar Pulau di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan data kedalaman kemiskinan (P1) antar pulau, terlihat adanya perbedaan yang cukup jelas mengenai seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Papua menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata 4,77. Di bawahnya terdapat pulau Nusa dan Bali dengan rata-rata 2,11. Disusul oleh Sulawesi dengan rata-rata 1,93. Pulau Sumatra berada pada posisi berikutnya dengan nilai 1,35. Sedangkan Pulau Jawa berada

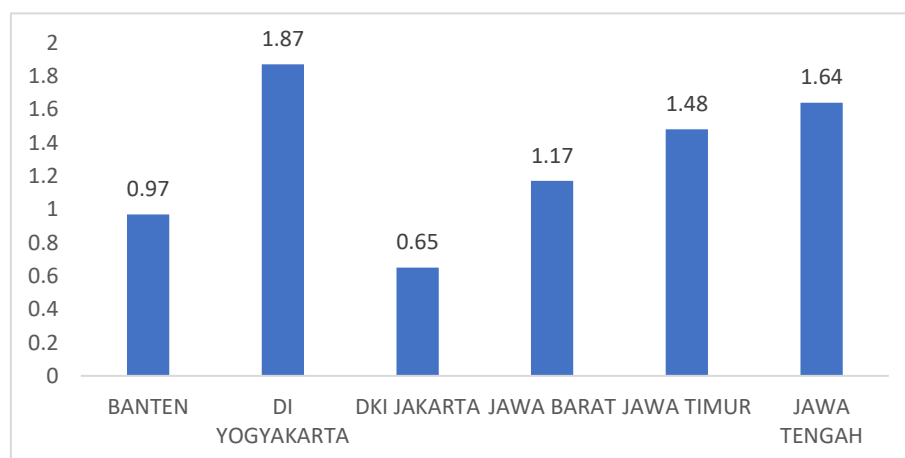
sedikit di bawah Sumatra dengan rata-rata 1,30. Terakhir ada Pulau Kalimantan dengan rata-rata 0,76.

Meskipun Pulau Jawa bukan wilayah dengan kedalaman kemiskinan tertinggi, namun dilihat dari sudut pandang perekonomian, Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian nasional, dimana Pulau Jawa berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 56,84% pada triwulan III tahun 2024. Secara teoritis, kondisi tersebut seharusnya mampu menekan kedalaman kemiskinan secara signifikan. Namun, faktanya nilai P1 di Pulau Jawa masih relatif tinggi yang mengindikasikan adanya persoalan dalam distribusi hasil pembangunan, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk miskin nasional justru terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi ini sejalan dengan fakta bahwa Pulau Jawa menampung sekitar 54% penduduk dari total populasi Indonesia. Kondisi ini diperkuat akibat struktur pasar tenaga kerja di Pulau Jawa yang masih didominasi oleh sektor informal dan pekerja dengan tingkat upah rendah. Ditengah laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, penciptaan lapangan kerja lebih banyak berorientasi pada penyerapan tenaga kerja secara kuantitatif, sementara peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan berjalan lebih lambat. Akibatnya, tidak sedikit penduduk yang telah bekerja namun tetap berada dalam kondisi miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Fenomena *working poor* ini mencerminkan bahwa peningkatan pendapatan output dan produktivitas ekonomi belum sepenuhnya terkonversi ke dalam peningkatan pendapatan bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi

yang terjadi cenderung kurang inklusif dan belum optimal dalam menurunkan kedalaman kemiskinan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, karena manfaat pembangunan cenderung terakumulasi pada kelompok dan sektor tertentu. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan, keterbatasan akses kelompok berpendapatan rendah terhadap kesempatan kerja produktif, serta perbedaan kualitas sumber daya manusia menyebabkan sebagian penduduk tetap berada dalam kondisi rentan meskipun tinggal di wilayah yang relatif maju (Aberth, 2024). Adapun persebaran kedalaman kemiskinan di Pulau Jawa dijelaskan pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2025)

Gambar 1. 2 Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024

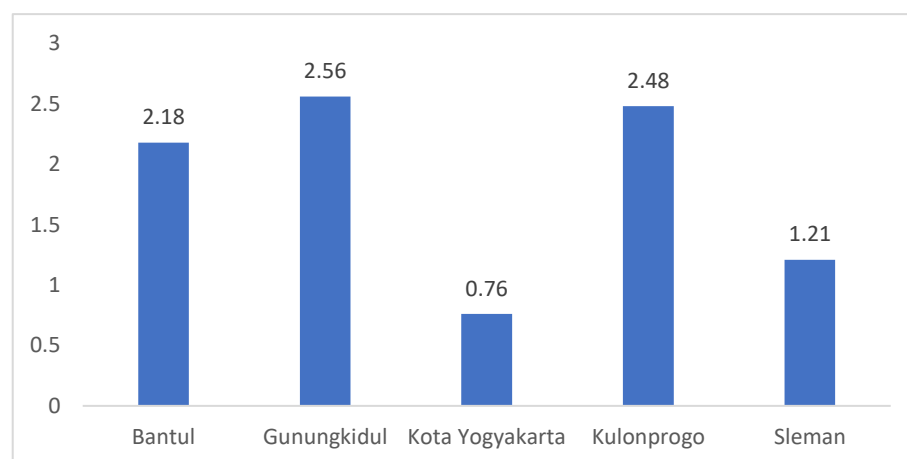
Kondisi kedalaman kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2024 menunjukkan pola yang beragam antar provinsi, sehingga penting untuk melihat bagaimana masing-masing wilayah menghadapi tantangan kemiskinan yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga sejauh mana penduduk

miskin tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data pada Gambar 1.2, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan kedalaman kemiskinan paling rendah, yaitu sebesar 0,65. Temuan ini diikuti oleh provinsi Banten dengan nilai 0,97 serta Provinsi Jawa Barat yang mencatat kedalaman kemiskinan sebesar 1,17.

Selanjutnya, kondisi di Jawa Timur menunjukkan nilai kedalaman kemiskinan sebesar 1,48, sedangkan Jawa Tengah sedikit lebih tinggi dengan nilai 1,64. Di sisi lain, DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,87 pada tahun yang sama. Perbedaan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang berbeda antar wilayah di Pulau Jawa. Sejalan dengan temuan tersebut, DI Yogyakarta tidak hanya sebagai provinsi dengan kedalaman kemiskinan tertinggi, tetapi juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Padahal, DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah serta memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang relatif lebih tinggi, Hal tersebut didukung dengan ketersediaan akses internet yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Namun faktanya, kondisi perekonomian DI Yogyakarta yang didominasi oleh sektor jasa, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi informal yang cenderung menghasilkan pendapatan rendah serta tidak stabil, sehingga menyebabkan banyak penduduk miskin berada jauh di bawah garis kemiskinan. Selain itu, tingginya proporsi pekerja informal dan setengah menganggur menyebabkan peningkatan pendapatan sulit terjadi secara signifikan meskipun aktivitas ekonomi berjalan. Faktor lain yang turut memperdalam kemiskinan adalah tingginya biaya hidup, terutama untuk perumahan dan

kebutuhan dasar, yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh tingkat upah (Firhani, 2025).

Ketidaksesuaian tersebut menjadikan DI Yogyakarta penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan kedalaman kemiskinan di wilayah ini relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Adapun persebaran kedalaman kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan dalam grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2025)

Gambar 1.3 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024

Kedalaman kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup jelas antar wilayah. Kabupaten Gunungkidul mencatat kedalaman kemiskinan tertinggi sebesar 2,56, diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo sebesar 2,48 dan Kabupaten Bantul sebesar 2,18. Sementara itu, Daerah perkotaan seperti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki kedalaman kemiskinan yang relatif lebih rendah, yakni 1,21 dan 0,76. Tingginya kedalaman kemiskinan di kabupaten dengan karakteristik pedesaan seperti Gunungkidul, Kulonprogo, dan Bantul tidak terlepas dari struktur

ekonomi dan pasar kerja yang didominasi oleh sektor primer dan sektor informal dengan tingkat produktivitas serta pendapatan yang relatif rendah. Kondisi ini terjadi meskipun wilayah tersebut secara agregat menunjukkan indikator ketenagakerjaan yang relatif baik, seperti tingkat pengangguran terbuka yang rendah dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi. Di wilayah pedesaan, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, infrastruktur ekonomi, serta rendahnya diversifikasi sumber pendapatan menyebabkan sebagian besar penduduk miskin bekerja pada sektor dengan upah rendah dan tidak stabil, sehingga mereka tetap berada pada kondisi yang jauh dari garis kemiskinan dan mendorong tingginya kedalaman kemiskinan.

Sebaliknya, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai wilayah perkotaan menunjukkan kedalaman kemiskinan yang paling rendah. Hal ini berkaitan dengan lebih luasnya kesempatan kerja di sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata, serta akses yang lebih baik terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jaringan ekonomi perkotaan. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan relatif lebih tinggi, jenis pekerjaan yang tersedia cenderung memberikan pendapatan yang lebih stabil dibandingkan wilayah pedesaan.

Perbedaan kondisi kedalaman kemiskinan antar wilayah tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyerapan tenaga kerja menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, salah satu variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengangguran. Menurut pandangan Keynes, meningkatnya pengangguran akan langsung menurunkan pendapatan rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Penurunan pendapatan ini tidak hanya meningkatkan resiko

jatuh miskin, tetapi juga memperdalam kondisi mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan (Aprirachman et al., 2025). Fenomena ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, di mana tingginya tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan tingginya kedalaman kemiskinan di kedua wilayah tersebut. Namun demikian, kondisi yang berbeda (*paradoks*) terjadi di Kota Yogyakarta, yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, tetapi justru mencatat kedalaman kemiskinan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran di Kota Yogyakarta relatif tinggi, kondisi tersebut tidak berdampak pada peningkatan kedalaman kemiskinan.

Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada hilangnya sumber pendapatan utama masyarakat. Hilangnya sumber pendapatan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya meningkatkan resiko kemiskinan, tetapi juga memperdalam kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Aprirachman et al. (2025) dimana tingkat pengangguran terbuka yang tinggi secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kedalaman kemiskinan, karena semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar kerja formal, semakin besar pula ketimpangan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi, temuan Syahrazad & Vidriza (2024) menemukan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan namun dengan arah hubungan yang negatif, artinya penurunan tingkat pengangguran terbuka justru berdampak pada peningkatan kedalaman kemiskinan.

Selain pengangguran, faktor lain yang dikaji dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam Teori *Dual Economy Model*, Lewis membagi perekonomian menjadi dua sektor utama, yaitu sektor tradisional (subsisten) dan sektor modern (kapitalis). Sektor tradisional umumnya berbasis pertanian dan informal, dicirikan oleh kelebihan tenaga kerja (*surplus labor*) namun dengan produktivitas marjinal yang sangat rendah bahkan mendekati nol. Akibatnya, meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja di sektor ini tinggi, pendapatan yang dihasilkan tetap rendah sehingga kemiskinan tetap bertahan. Sebaliknya, sektor modern memiliki produktivitas dan upah yang lebih tinggi, tetapi kapasitas penyerapan tenaga kerjanya terbatas (Hubbansyah et al., 2023).

Fenomena ini tercermin pada kondisi di Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, dan Bantul, di mana tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja belum mampu menurunkan kedalaman kemiskinan. Hal ini disebabkan dominasi penduduk yang bekerja di sektor tradisional, khususnya pertanian yang memiliki produktivitas rendah sehingga belum mampu memutus rantai kemiskinan. Sebaliknya, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan ketiga kabupaten tersebut, namun justru mencatat kedalaman kemiskinan terendah di Provinsi DI Yogyakarta. Kondisi ini sejalan dengan teori *Dual Economy Model* di mana sebagai wilayah perkotaan, pekerjaan di dominasi oleh sektor modern dengan produktivitas dan upah yang lebih tinggi sehingga berperan dalam menekan kedalaman kemiskinan.

Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini memperluas

peluang memperoleh pendapatan, sehingga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat menyempit, sehingga kedalaman kemiskinan cenderung menurun. Berdasarkan studi Pangestu & Artaningtyas (2023) rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat memperdalam kemiskinan, karena keterbatasan keterlibatan penduduk dalam pasar tenaga kerja mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan yang memadai bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun penelitian lain oleh Fitria & Novita (2024) menemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Dalam teori lain seperti Teori Malthusian, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat atau tidak terkendali akan menimbulkan tekanan pada sumber daya alam, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini menyebabkan penduduk yang semakin banyak tidak mendapatkan pekerjaan atau pendapatan yang memadai sehingga memicu peningkatan angka kemiskinan hingga memperdalam kedalaman kemiskinan (Saputra et al., 2025). Dalam konteks kabupaten/kota di provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Bantul menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan sejalan dengan kedalaman kemiskinan yang juga cukup tinggi. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Sleman, yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi karena berfungsi sebagai kawasan hunian alternatif bagi penduduk yang bekerja di pusat Kota Yogyakarta. Banyak mahasiswa, pekerja, dan keluarga muda memilih bermukim di Kabupaten Sleman karena biaya hidup dan hunian yang relatif lebih terjangkau dibandingkan

dengan pusat kota, sementara akses terhadap fasilitas perkotaan seperti pendidikan dan pekerjaan tetap mudah dijangkau karena jarak yang tidak terlalu jauh. Namun demikian, Teori Malthusian tidak sepenuhnya relevan dalam menjelaskan kondisi di Kabupaten Gunungkidul. Meskipun memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, kabupaten ini justru menjadi wilayah dengan kedalaman kemiskinan tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dan kedalaman kemiskinan tidak selalu bersifat linier, sehingga terdapat faktor lain yang berperan dominan dalam mempengaruhi kedalaman kemiskinan di wilayah tersebut.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang harus ditanggung oleh kapasitas ekonomi yang tersedia. Ketika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup semakin besar. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar menurun, sehingga jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin melebar dan mendorong peningkatan kedalaman kemiskinan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung memiliki kemiskinan lebih besar. Menurut Berliani (2021) laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi dapat disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang pesat. Sejalan dengan Suryani & Putri (2020) semakin meningkatnya jumlah penduduk maka sumber daya alam akan semakin berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan. Namun dalam penelitian Putra et al., (2022)

menemukan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan.

Selain faktor ketenagakerjaan dan demografis, perkembangan teknologi informasi juga menjadi aspek penting dalam memahami dinamika kedalaman kemiskinan, Teori Kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen menjelaskan kemiskinan dipahami sebagai keterbatasan kemampuan individu dalam memperluas pilihan dan kebebasan hidupnya, bukan semata-mata kekurangan pendapatan. Teori ini menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya dan informasi sebagai sarana untuk meningkatkan kapabilitas individu. Dalam konteks ini, akses internet berperan sebagai alat pemberdayaan yang memungkinkan individu memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, serta memperluas peluang ekonomi dan sosial (Baykal, 2025). Teori ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang notabene nya merupakan kawasan perkotaan, tingginya penetrasi akses internet sejalan dengan rendahnya kedalaman kemiskinan di kabupaten/kota tersebut. Akses internet yang baik mampu membantu berbagai kegiatan masyarakat seperti mengakses pendidikan daring, akses informasi kesehatan, hingga memperoleh peluang usaha. Namun demikian, sebaliknya di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo meskipun memiliki akses internet yang tinggi nyatanya tidak sejalan dengan kondisi kedalaman kemiskinan yang cenderung masih tinggi.

Peningkatan akses internet dapat memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, dan mengakses aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Dengan akses internet yang lebih baik, masyarakat

memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usaha, serta meningkatkan pendapatan. Kondisi ini memperkuat daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat menyempit dan kedalaman kemiskinan cenderung menurun. Sejumlah studi menunjukkan bahwa disparitas akses internet berdampak pada kedalaman kemiskinan, karena masyarakat yang sulit mengakses jaringan digital cenderung memiliki peluang lebih rendah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Penelitian Gunawan (2025) menemukan bahwa penggunaan internet memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, artinya pengguna internet mengalami lebih sedikit deprivasi di berbagai dimensi kemiskinan dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan.

Meskipun banyak variabel telah dikaji secara terpisah dalam penelitian sebelumnya, masih terdapat kekurangan dalam analisis secara simultan yang menggabungkan variabel tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan akses internet terhadap kedalaman kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada satu atau dua variabel saja, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kemiskinan struktural di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan indikator tingkat kemiskinan (P0) yang hanya menggambarkan persentase penduduk miskin tanpa melihat seberapa jauh kondisi mereka berada dibawah garis

kemiskinan. Padahal, penggunaan kedalaman kemiskinan (P1) memberikan keunggulan analitis karena mampu mengukur jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan sehingga dapat menangkap intensitas atau derajat kemiskinan secara lebih akurat. Berbeda dengan tingkat kemiskinan (P0) yang hanya menunjukkan jumlah atau persentase penduduk miskin, P1 mampu menggambarkan kualitas kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan P2 lebih menekankan pada tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dengan memberikan bobot yang lebih besar pada kelompok yang berada paling jauh dari garis kemiskinan. Meskipun P2 mampu menangkap aspek keparahan kemiskinan secara lebih mendalam, indikator ini cenderung sensitif terhadap nilai ekstrem sehingga kurang representatif dalam menggambarkan kondisi rata-rata keseluruhan penduduk miskin.

Dengan indikator ini, dapat diidentifikasi apakah penduduk miskin berada sedikit di bawah garis kemiskinan atau justru jauh tertinggal. Penggunaan P1 juga memungkinkan analisis yang lebih sensitif terhadap perubahan kecil pada pengeluaran rumah tangga, sehingga lebih efektif dalam menangkap dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu. Keunggulan tersebut menjadikan pemilihan P1 dalam penelitian ini sebagai elemen baru untuk mengisi kekosongan di dalam penelitian, terutama karena belum banyak penelitian yang mengkaji pengaruh faktor ketenagakerjaan, demografi, dan akses digital terhadap kedalaman kemiskinan.

Tingginya kedalaman kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah, tingginya partisipasi angkatan

kerja, pertumbuhan penduduk yang tidak merata, serta kesenjangan akses internet memperkuat urgensi penelitian ini untuk menghasilkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kedalaman kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang, penelitian dengan judul **Pengaruh Pengangguran, Partisipasi Angkatan Kerja, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Akses Internet terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2024** diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik melalui penguatan literatur mengenai determinan kedalaman kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam mengarahkan pembangunan yang lebih inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan akses internet secara parsial terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2016-2024.
- b) Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan akses internet secara bersama-sama terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2016-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

- a) Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan akses internet secara parsial terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2016-2024.
- b) Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan akses internet secara bersama-sama terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2016-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kedalaman kemiskinan khususnya dalam ruang lingkup daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara variabel ketenagakerjaan (tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja), kependudukan (laju pertumbuhan penduduk), serta akses internet terhadap kedalaman kemiskinan, terutama dalam konteks wilayah perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan pendekatan, variabel, atau wilayah yang berbeda.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Beberapa kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta memperluas wawasan mengenai dinamika kedalaman kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b) Bagi pemerintah, memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta perluasan akses internet sebagai upaya menekan kedalaman kemiskinan.
- c) Bagi akademik dan penelitian, penelitian ini menjadi literatur tambahan dalam kajian mengenai kemiskinan, terutama mengenai hubungan antara tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan akses internet terhadap kedalaman kemiskinan.
- d) Bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengurangi kedalaman kemiskinan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada analisis data kemiskinan regional yang mencakup variabel tingkat

